

RADEN TOEMOENGGOENG ENDOENG SOERIAPOETRA SEBAGAI BUPATI BANDUNG (1945-1947)

Oleh:
Kharista Setyo Nur Utami, Wawan Darmawan¹

ABSTRACT

The local historical event that occurred in Bandung Regency under R. E. Soeriapoetra during the revolution era was in a state of a refugee. This was due to attacks carried out by the Dutch who wanted to return to control Indonesia. In general, this study wants to answer the question about "How was Raden Toemoenggoeng Endoeng Soeriapoetra administered of his government amid the political crisis post-independence?". This research aimed to analyze the local government under R.T.E. Soeriapoetra in Bandung Regency. To discuss the study, the researcher conducted a study using historical methods that include heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Based on the results it can be explained that even though the administration under R.T.E. Soeriapoetra's leadership was unstable, the local government still ran due to good communication and cooperation between the leaders, subordinates and the people. The undertaken program was only related to the government's situation at that time such as making roads, repairing roads and supplying food, clothing for the fighters and also the people because at that time the process of government is in a state of a refugee. So that in his leadership as Regent of Bandung not many programs were made. He also served as Regent of Bandung in a short time which is only two years, starting from 1945-1947, because caught by the Dutch. He was also offered to become regent again under Pasundan State but he refused. He chose to be detained rather than having to cooperate with the Dutch.

Keywords: Bandung Regency, Raden Toemoenggoeng Endoeng Soeriapoetra

PENDAHULUAN

Sejarah masasalam Kabupaten Bandung selalu menarik untuk digali dan dikaji. Beberapa pakar sejarah menempatkan wilayah ini sebagai kawasan yang selalu memunculkan hal-hal baru dan tidak terduga dalam perspektif sejarah masa lampau. Tidak terkecuali dalam sejarah perjalanan masyarakat dan pemerintahan

Kabupaten Bandung. Banyak hal yang dapat digali dan dikaji sebagai cerminan nilai-nilai luhur masa lampau yang positif untuk dijadikan pedoman pada masa sekarang. Sebuah perjalanan sejarah kepemimpinan yang sangat panjang telah dilalui pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kepemimpinan Bupati

¹Kharista Setyo adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Wawan Darmawan adalah Dosen Pembimbing. Penulis dapat dihubungi di alamat *email* : kharistanurutami1996@gmail.com

Bandung merupakan kepemimpinan yang unik dengan warna tradisional yang kental dan melekat secara khas.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada pola kepemimpinan yang berubah, yaitu dengan mengurangi kekuasaan dan hak bupati, termasuk hak mewariskan jabatan, karena pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui prinsip pergantian bupati secara turun menurun (Yulifar, 2014, hlm. 22-26). Sampai akhir masa pemerintahannya, upaya tersebut mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh kuatnya kedudukan atau posisi bupati dalam kehidupan di daerah Kabupaten. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, Bupati Bandung dijabat oleh R.A.A. Wiranatakusumah V. Kekuasaan bupati menurut garis tradisional masih tetap dihormati atau tidak diganggu-gugat oleh pemerintah militer Jepang. Pada akhir masa pendudukan Jepang Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V diangkat untuk menjabat Naimmbu Senyo di Jakarta. Dengan demikian, jabatan Bupati Bandung menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan itu, pada tanggal 5 Juni 1945 pemerintah militer Jepang mengangkat R.E. Soeriapoetra menjadi Bupati Bandung. Sampai Indonesia merdeka jabatan Bupati Bandung tetap dipegang oleh Bupati R.E. Soeriapoetra (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 86).

Dari pernyataan di atas menimbulkan masalah yang perlu dikaji mengapa pemerintah daerah Kabupaten Bandung, setelah Indonesia merdeka tetap menunjuk R.E. Soeriapoetra sebagai Bupati Bandung. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengapa hal itu terjadi, karena apabila dilihat dari pola kepemimpinan Bupati Bandung

sebelumnya dipilih berdasarkan garis keturunan sedangkan R.E. Soeriapoetra bukan keturunan Bupati Bandung melainkan Bupati Sumedang. Apakah saat ia terpilih sebagai Bupati Bandung, ada perlawanan di kalangan menak Bandung yang menentang pemilihan bupati di luar garis keturunan Bupati Bandung. Maka dari itu peneliti merasa ada sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Pada saat R.T.E. Soriapoetra menjadi Bupati Bandung periode 1945-1947 terjadi berbagai pergolakan politik, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka namun perjuangan tersebut belum berakhir, bangsa Indonesia masih perlu berjuang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang telah Indonesia capai bukanlah hasil akhir dari perjuangan, akan tetapi awal perjuangan baru dalam membangun tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan kedaulatan dilakukan perjuangan fisik dan non fisik (Prihartanti, 2010, hlm. 1). Memasuki bulan September 1945, Indonesia mengalami situasi krisis di mana masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian, rasa cemas, ketakutan, dan desas-desus akan bahaya musuh yang datang mengancam, baik dari dalam maupun luar (Reid, 1974, hlm. 54). Situasi kemelut politik inilah yang terjadi di Bandung, ketika pemerintahan Bandung harus mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia (Smail, 2011, hlm. 78). Situasi di Bandung semakin memanas ketika Sekutu memberikan ultimatumnya untuk mengosongkan Kota Bandung, akibatnya terjadi peristiwa Bandung Lautan Api sehingga pemerintah Kabupaten Bandung harus mengungsi

ke luar Kota Bandung. Dalam proses pengungsian tersebut seringkali di serang oleh pihak Belanda, mengakibatkan pemerintah daerah harus pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih aman (Abdurachman, 2000, hlm. 114).

Berdasarkan pernyataan di atas menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji yaitu, bagaimana R.T.E. Soeripoetra sebagai Bupati Bandung dalam menjalankan roda pemerintahannya di tengah situasi politik yang kian memanas, dan bagaimana ia dalam menjalankan perannya sebagai bupati di mana dalam proses pemerintahannya harus berpindah-pindah karena terus diserang oleh pihak Belanda. Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran R.T.E. Soeripoetra sebagai Bupati Bandung 1945-1947.

Peneliti pun menemukan artikel jurnal yang dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Artikel ini ditulis oleh Bagus Wirawan, yang berjudul Respon Lokal Terhadap Revolusi Indonesia di Sunda Kecil, 1945-1950. Dimuat dalam Jurnal Humaniora, Volume 20, No. 1, Februari 2008. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai pembentukan alat kelengkapan negara pada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 Agustus 1945. Panitia kecil diberikan tugas untuk menyusun rancangan pembagian wilayah negara, kepolisian, dan tentara. Dalam jurnal ini juga sedikitnya memberikan informasi kepada peneliti, mengenai proses pengangkatan bupati karena di dalamnya dijelaskan mengenai proses menyusun rancangan pembagian wilayah negara, kepolisian, dan tentara. Serta dijelaskan bahwa pada saat itu Bupati Bandung yaitu R.T.E. Soeripoetra ditunjuk sebagai

bupati oleh KNID setempat. Sehingga jurnal ini hanya membantu peneliti dalam hal mengkaji proses pengangkatan R.T.E. Soeripoetra sebagai Bupati Bandung. Selain itu juga memberikan penguatan kepada peneliti bahwa R.T.E. Soeripoetra ketika Indonesia merdeka ditunjuk oleh KNID setempat bukan lagi berdasarkan garis keturunan seperti pengangkatan Bupati Bandung sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008, hlm. 39). Senada dengan Gottschalk, Ismaun, Winarti & Darmawan (2016, hlm. 39) menyatakan bahwa metode sejarah ialah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismaun, Winarti & Darmawan (2016, hlm. 60-61) meliputi heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah melalui studi kepustakaan yakni dengan membaca dan mengkaji buku-buku serta artikel yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang dikaji dan juga teknik wawancara dengan mewawancarai narasumber yang relevan dengan kajian peneliti. Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pencarian sumber mengenai permasalahan yang dikaji di beberapa perpustakaan yang

berada di Bandung dan juga Jakarta. Setelah melakukan heuristik, peneliti melakukan kritik. Pada tahap ini kritik yang dilakukan ada dua yakni kritik eksternal dan internal.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yang sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori menyusun fakta tersebut menjadi suatu interpretasi yang menyeluruh (Kuntowijoyo, 1995, hlm. 100). Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk merekonstruksi kembali peristiwa yang terjadi mengenai peranan Bupati Bandung R.T.E. Soriapoetra. Rekonstruksi tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang telah didapat. Adapun rekonstruksi tersebut dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah mengadakan sintesis sejarah, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah dalam historiografi untuk mewujudkan cerita sejarah (Ismaun, Winarti, & Darmawan, 2016, hlm. 61).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Raden Toemoenggoeng Endoeng Soeriapoetra menjabat sebagai bupati Bandung sejak akhir pemerintahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka ia diangkat oleh KNID setempat sebagai realisasi UUD 1945 dan PP. No.2 tahun 1945. Orang-orang yang ditunjuk sebagai pegawai di pemerintahan daerah ialah orang yang pernah menduduki jabatan

yang sama pada masa pemerintahan militer Jepang (Wirawan, 2008, hlm. 57). Pengangkatan pejabat-pejabat lama tersebut rupanya didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka cukup berpengalaman dalam jabatan tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah tetap berjalan, walaupun dalam suasana revolusi. Sehingga kalau pun diganti pada masa itu sangatlah sukar untuk mencari pengganti yang memang memadai (Badan Pengembangan Informasi Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 86). R.T.E. Soeriapoetra meskipun bukan keturunan dari menak Bandung akan tetapi ia telah lama tinggal dan bekerja di Bandung. Sehingga saat ia ditunjuk sebagai Bupati Bandung tidak menimbulkan konflik di kalangan menak Bandung.

Bupati Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra didampingi sekertaris: Mahmud Sumadilaga, Kepala Bagian Keuangan: Ateng Masyur, Kepala Bagian Urusan Pegawai: Wiganda, Kepala Bagian Pekerjaan Umum: R. Atik Gandakusumah. Di tingkat lebih bawah tidak mengalami perubahan pejabat, sama seperti sebelum kemerdekaan. Misalnya Wedana Ujungberung: E. Ipik Gandamana, Wedana Ciparay: R. Sabri Kartasoemantri, Camat Buahbatu: Winarya Suradireja, dan Camat Majalaya: Suryapranata. Hanya ditambah dengan badan-badan baru yang muncul, seperti Komite Nasional Daerah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Sutalaksana. Badan Keamanan Rakyat dipimpin oleh Gandawijaya dan Laskar rakyat dengan pimpinanya Ibrahim, Johari, dan Rahman Sainan (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 204).

Memasuki tanggal tanggal 15 September 1945 tentara Sekutu mendarat

di Jakarta. Mereka tergabung dalam *Allied Forces in Netherlands East Indies* (AFFNEI) atau tentara Sekutu buat Indonesia di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas mereka selama berada di Indonesia, ialah untuk melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan perang dan orang-orang internian, melucuti tentara Jepang dan mengembalikannya ke tanah airnya serta memelihara ketertiban dan keamanan umum. Tentara Inggris, turut membonceng pula tentara dan sipil Belanda yang bertujuan ingin menjajah kembali Indonesia (Abdurachman, dkk, 2000, hlm. 48-49).

Oleh karena itu tidak aneh, apabila setelah adanya tentara Inggris dan tentara Belanda di negara Indonesia timbullah kekacauan dimana-mana. Kekacauan-kekacauan itu sebagai akibat bentrokan kepentingan dan tujuan antara rakyat Indonesia dan orang Belanda, yang kemudian diwujudkan dalam bentrokan tenaga dan senjata. Pemerintahan Indonesia yang pada waktu itu baru berdiri dan mulai merintis kebijakan-kebijakan politiknya, sudah dihadapkan lagi pada permasalahan baru dengan kedatangan pasukan Sekutu yang membonceng NICA. Kedatangan Sekutu ke Indonesia diikuti dengan menerapkan kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat Indonesia. Akibatnya, keadaan sosial, ekonomi, politik bangsa Indonesia tidak stabil. Salah satu kebijakan Sekutu yang merugikan bangsa Indonesia, seperti adanya blokade ekonomi dari Belanda (Nurcahya, 2014, hlm. 490).

Sementara itu keadaan di Jawa Barat, khususnya di Bandung, dari hari ke hari semakin kacau. Dalam upaya

untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Ketegangan ditambah dengan bebasnya orang-orang Belanda dan Indo-Belanda dari tawanan Jepang yang kemudian mempersenjatai diri dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memusuhi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi seperti itu, pada tanggal 12 Oktober 1945 Brigade MacDonald dari Divisi India ke-23 tiba di Kota Bandung dengan menumpang kereta api. Mereka datang ke Bandung dalam rangka pendudukan Sekutu di Indonesia. Dalam Pasukan Sekutu itu turut membonceng tentara NICA. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945 dilakukan pertemuan antara Sekutu dengan pihak TKR (Amar, 1963, hlm. 91). Dalam pertemuan itu pihak Sekutu meminta bantuan pada TKR agar tugasnya dapat berjalan lancar. Pihak TKR pun meminta pada pihak Sekutu agar membantu pihak Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama untuk mencegah provokasi-provokasi dari pihak Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali (Irwana, 2011, hlm. 22).

Dalam perkembangannya, ternyata pihak Sekutu lebih berpihak kepada Belanda, sehingga situasi menjadi bertambah tegang. Terjadilah bentrokan senjata di berbagai tempat. Misalnya di Bojongsokosan pada tanggal 13 Desember 1945, tatkala tentara kita menghadang konvoi tentara sekutu (Inggris dan Belanda) terjadi pertempuran hebat. Pertempuran di daerah ini tidak kalah hebatnya dengan Peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya. Selain itu, di sekitar Gunung Masigit pada tanggal 17 Desember 1945 terjadi penghadangan konvoi tentara Sekutu. Kali ini

penghadangan dilakukan oleh Batalyon V Dujeh Suharsa dan Detasemen Momon. Pihak Sekutu mengalami kerugian besar dengan serangan ini. Selanjutnya terjadilah dua peristiwa di Kabupaten Bandung yaitu peristiwa Bandung Lautan Api dan Peristiwa Dayeuh Kolot yang mengakibatkan gugurnya Mohammad Toha dan Mohamad Ramdan (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 88).

Akibat ultimatum tentara Sekutu di Bandung, yakni supaya pasukan-pasukan bersenjata/TRI, Polisi, dan lain-lain meninggalkan Kota Bandung jarak 11 km dengan pemberian tempo sampai tanggal 24 Maret mulai jam 12.00, sehingga mengakibatkan rakyat dan para pejuang harus membumihanguskan Kota Bandung, dari pada harus dikuasai oleh Pemerintahan Belanda/Sekutu (Tim Pelaksana Penelitian dan Penulisan Sejarah Bandung, 1981, hlm. 3). Tiga hari sebelum batas waktu ultimatum habis, Bupati Bandung Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra menerima utusan tentara Inggris yang datang ke kantor Kabupaten. Utusan Tentara Inggris itu meminta kepada bupati supaya seluruh pegawai dan pasukan Kabupaten Bandung dipindahkan dari Kota Bandung ke seberang Sungai Citarum. Kalau sampai pada batas waktunya masih berada di dalam kota, mereka akan membasminya (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 209).

Pada malam hari, ke Kabupaten Bandung datanglah utusan dari Tentara Republik. Mereka mengatakan: "Pak, sekarang kita pindah". Bupati Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra tidak menolak ajakan itu dan langsung

memutuskan untuk pindah keluar Kota Bandung. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bagian Pekerjaan Umum T. Oetit Gandakusumah karena pada bagian P.U. terdapat alat-alat transportasi berupa dua buah mobil. Barang-barang/ alat tulis-menulis kantor dan barang-barang peralatan rumah tangga keluarga Bupati Bandung dengan diangkut oleh kendaraan kabupaten dibawa ke Banjaran. Namun baru sampai di Bojongloa kendaraan yang membawa barang-barang peralatan rumah tangga Bupati dicegat oleh sebuah pasukan rakyat. Barang-barangnya harus dikembalikan lagi. Kemudian barang-barang itu hilang tak tentu rimbanya (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 93).

Pada waktu Kota Bandung harus ditinggalkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 23 Maret 1946 ada Peristiwa Bandung Lautan Api (Darmawan, 1996, hlm, 57). Sehingga Pemerintahan Daerah harus mengungsi. Tentang pengungsian ini sumber lain mengatakan, bahwa berhubung keadaan Kota Bandung tidak aman, sering terjadi pertempuran, maka atas perintah Residen Priangan Ardiwinangun, pemerintah Kabupaten Bandung diungsikan ke Cililin. Di Cililin bupati dan rombongan tinggal beberapa hari (ada yang mengatakan tiga hari dan ada yang mengatakan empat hari). Kantor kabupaten terletak di sebelah timur markas dan asrama TKR yang menempati bangunan sekolah (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 210).

Rupanya markas dan asrama TKR serta kantor kabupaten di Cililin diketahui oleh Belanda sehingga tak lama kemudian Cililin dihujani oleh peluru dan mortir. Tentara Belanda itu berkedudukan di

Batujajar pada tanggal 29 Januari 1946 markas besar Tentara Inggris dipindahkan dari Jakarta ke Bandung, dan sejak bulan Maret 1946 Panglima Tentara Inggris mengizinkan pihak Belanda mendaratkan tentaranya di Indonesia. Kemudian Batujajar dijadikan tempat kedudukan pemerintah tentara Belanda. Peristiwa penembakan itu mengakibatkan beberapa orang anggota TKR dan rakyat luka-luka (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 211). Selanjutnya, kedudukan pemerintah Kabupaten Bandung dialihkan ke Soreang. Di sana kantor kabupaten menempati sebuah sekolah. Akan tetapi, karena ruangnya tidak mencukupi kebutuhan kantor, kedudukan kantor pemerintah Kabupaten Bandung dialihkan lagi ke Banjaran. Bupati Bandung Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra tetap bertempat tinggal di Soreang, menempati rumahnya sendiri. Di Banjaran kantor kabupaten terletak di Kamasan (Lubis, 2007, hlm. 26).

Ketika kantor pemerintah Kabupaten Bandung berkedudukan di Banjaran terdapat pengumuman yang menyatakan bahwa semua pegawai Kabupaten Bandung hendaknya mengungsi ke Banjaran dan siapa yang tidak ikut mengungsi ke Banjaran hendaknya mengabungkan diri dengan pemerintah terdekat. Kenyataannya memang tidak semua pegawai pemerintah Kabupaten Bandung turut mengungsi bersama-sama bupatinya. Bahkan ada pegawai yang tetap tinggal di Kota Bandung. Mereka yang mengungsi ada yang secara rombongan, adapula yang secara sendiri-sendiri (Adeng & Thresnawaty, 2003, hlm. 71). Dalam perjalanan pengungsian, pemandangan yang menyedihkan dan mengenaskan hati sangat mewarnai

suasana saat itu. Kepanikan, kepasrahan, kegeraman, dan semangat berbaur menjadi satu. Penduduk Kota Bandung ikut mengungsi dan sebagian besar mereka mengungsi ke daerah Kabupaten Bandung, kerelaan penduduk Kota Bandung untuk mengungsi menunjukkan kesetiaan rakyat terhadap perjuangan dan kemauan kuat untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Kesetiaan ini menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan (Abdurachman, dkk, 2000, hlm. 103).

Dapat dibayangkan, betapa sibuknya rakyat dan pemerintah setempat (kewedanaan, kecamatan, dan desa). Rakyat Kabupaten Bandung dengan penuh kesadaran menyediakan sebagian rumahnya dan makan untuk menerima para pengungsian dari Kota Bandung dan sekitarnya; juga untuk tentara serta pasukan dari badan perjuangan lainnya. Di samping itu, rakyat Kabupaten Bandung pun ada yang turut mengungsi. Misalnya penduduk dari Kecamatan Cicadas dan Ujungberung banyak yang mengungsi ke daerah Banjaran dan Majalaya (Badan Pengembangan Informasi Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 94). Rumah Bupati Bandung R.T.E. Soeriapoetra di Soreang menjadi semacam dapur umum yang membagikan makanan bagi pasukan perjuangan baik dari TRI, badan perjuangan rakyat, maupun pegawai kabupaten berdatangan ke rumah Bupati Bandung untuk meminta makan dan bekal makanan lainnya. Hasil panen sawahnya, beras kiriman dari saudaranya di Sumedang dan beras kiriman rakyat dari Lembang, sebagian besar habis untuk menjamin kaum perjuangan (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981, hlm. 300).

Di Banjarnegera pemerintahan daerah Kabupaten Bandung berlangsung hingga bulan Juli 1946. Pada suatu malam di bulan Juli 1946, tatkala sedang ada keramaian kota kewedanaan Banjarnegera dihujani bom oleh tentara Belanda. Kepanikan, ketakutan dan kekacauan tidak terperiikan lagi. Akibat bom itu banyak rakyat yang tewas luka-luka. Dokter-dokter kabupaten segera melaksanakan kewajiban merawat dan mengobati orang-orang yang luka-luka tersebut. Kewajiban yang seperti itu, disamping memeriksa dan mengobati rakyat yang menderita sakit merupakan kewajiban mereka sehari-hari selama dalam pengungsian (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 209).

Siangnya banyak rakyat yang mengungsi ke daerah yang lebih jauh ke arah selatan. Demikian pula pemerintah Kabupaten Bandung dipindahkan lagi ke Pangalengan, pemindahan ini dimaksudkan untuk menghindari sergapan tentara Belanda, yang terus menerus mengadakan serangan ke daerah Bandung Selatan. Bupati Bandung Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra menempati kediaman lurah pangalengan yang masih keluarga dari Yogi S. Memed, namun itu pun tidak lama (Sastranegara, wawancara, 27 Februari 2018), karena serangan tentara Belanda tiada henti-hentinya, bahkan sampai ke Tiangroke dan Jagabaya, Pemerintah Kabupaten Bandung dipindahkan lagi ke Santosa, lalu ke Cikopo, Pasirgaru dan Bungbulang, daerah Garut (Adeng & Thresnawaty, 2003, hlm. 72).

Sekalipun dalam pengungsian pemerintah Kabupaten Bandung berjalan seperti biasa. Dalam arti administrasi

dikerjakan, adagarapan kerja, gaji pegawai dilaksanakan, ada kenaikan pangkat/tingkat, hubungan ke atas ataupun ke bawah selalu ada dan struktur pemerintahan tetap diatur. Bagian pekerjaan umum terus berusaha mengerjakan perbaikan jalan dan memperlebar jalan yang ada di daerah Bandung Selatan. Jalan tersebut dibangun oleh para tentara, dan pada saat itu yang memberikan pasokan makanan adalah Bupati Bandung Suriaputra, ia selain memberikan pasokan makanan juga memenuhi setiap kebutuhan logistik militer, jadi memang pada saat itu ada pembagian tugas baik antara pemerintah sipil maupun tentara (Sumantri, wawancara, 11 Januari 2018). Pada saat itu hubungan tentara dan bupati cukup dekat karena ada komunikasi yang baik. Jalan-jalan yang dibangun ini sangat diperlukan oleh rakyat yang dalam perjalanan mengungsi agar mempermudah proses pengungsian (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 212).

Pegawai-pegawai kabupaten yang lain tidak mempunyai tugas atau pekerjaan tertentu, mereka membantu pemerintah setempat (kewedanaan, kecamatan, dan desa) dalam menjalankan roda pemerintahan serta menolong para pengungsi. Mereka berusaha untuk mencarikan dan membagikan makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya terhadap para pengungsi dan rakyat setempat. Dalam membantu meringankan beban kaum pengungsi, pemerintah setempat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, baik yang masih dalam lingkungan Kabupaten Bandung, maupun pemerintah Kota Besar Bandung (Adeng & Thresnawaty, 2003, hlm. 73).

Laskar Rakyat Kota Besar Bandung di bawah komandan R. Ema Bratakusumah tidak sedikit jasanya dalam menolong para pengungsi, terutama para pengungsi dari Kota Bandung, dari berbagai kesulitan hidup. Pasukan laskar rakyat bergerak di daerah Bandung Selatan dan Bandung Timur. Agar roda pemerintah untuk semua daerah Kabupaten Bandung dapat berjalan lancar, maka pada waktu mengungsi daerah kabupaten dibagi dua (Budi, 2009, hlm. 28):

1. Daerah Utara, yang meliputi daerah Lembang dan Cicalengka di bawah perintah Patih Bandung Anggakusumah
2. Daerah Selatan, semua daerah Kabupaten Bandung, kecuali Lembang dan Cicalengka. Daerah ini langsung ada di bawah perintah bupati

Tatkala sedang mengungsi di Santosa, kantor pemerintah Kabupaten Bandung menempati kantor perkebunan. Pegawai-pegawai kabupaten ditempatkan di bedeng-bedeng (perumahan) pegawai perkebunan. Pengambilan inisiatif, penggerak roda pemerintahan dan pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah dipegang oleh Sekertaris Kabupaten Mahmud Sumadilaga (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 95). Sementara itu, Pemerintah Keresidenan Priangan pindah ke Garut. Pada mulanya menempati Desa Cinta, di sekitar Gunung Talagabodas Kabupaten Garut, sebagai pusat pemerintahan sementara. Pemilihan Desa Cinta kemungkinan disebabkan Residen Priangan pada masa itu, Sanusi Hardjadinata, berasal dari desa tersebut. Oleh karena di desa itu pun tidak aman, Pemerintah Keresidenan

Priangan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat yang lebih aman, yaitu ke sekitar gunung Syawal (Lubis, 2007, hlm. 30).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyingkir dari Kota Bandung ke Garut. Kemudian karena kondisi kurang aman, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dipindahkan dari Garut ke Tasikmalaya. Ketika tersiar berita bahwa ada kemungkinan Belanda akan menyerang secara besar-besaran pada bulan Mei 1947, Gubernur Jawa Barat pada masa itu, M. Sewaka mengadakan peninjauan ke beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu ke Bandung Selatan, Sukabumi dan Banten, untuk memperingatkan pemerintah daerah setempat (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 95). Setelah mengetahui gerakan tentara Belanda ditunjukkan ke kota-kota tempat kedudukan markas TNI dan pemerintah daerah, pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninggalkan tempat kedudukannya dari dalam Kota Tasikmalaya ke luar kota tersebut. Semula tidak begitu jauh dari kota, tetapi kemudian karena desakan tentara Belanda pengungsian itu makin lama makin jauh.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mula-mula menyingkir dari Kota Tasikmalaya ke Indihiang dan Cikoneng, kemudian menuju selatan Tasikmalaya, yaitu ke Sukaraja, tempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat pindah lagi ke Karangnunggal, kemudian ke Lebaksiuh, sebuah desa yang terletak di tengah hutan, di mana banteng dan binatang liar lainnya masih berkeliaran. Di desa tersebut Gubernur Sewaka membuka kantor gubernur darurat. Namun Lebaksiuh pun

ternyata tidak aman karena pesawat udara musuh selalu mengintai dan terpaksa kedudukan Pemerintah Jawa Barat pindah lagi ke Desa Cikuya dan kemudian ke Tawangbanteng, sebelah utara Singaparna setempat (Sewaka, 1955, hlm. 89).

Pemerintah pusat tidak tinggal diam melihat serangan-serangan tentara Belanda terhadap wilayah-wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan memulihkan keamanan melalui jalan diplomatik terus dilakukan. Tercatatlah dalam sejarah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda, antara lain Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946, yang kemudian naskahnya ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan tersebut antara lain dibicarakan tentang pengembalian pemerintahan di Pengungsian ke Kota Bandung (Aburachman, dkk, 2000, hlm. 130). Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dirasa perlu dalam mempertahankan kemerdekaan RI, selain itu juga masyarakat Indonesia perlu bertindak tenang dan taat kepada pemerintah (Suwirta, 2002, hlm. 52). Bagi Penduduk kota Bandung yang mengungsi, tercapainya persetujuan tersebut membuka kesempatan mereka untuk kembali ke kampung halamannya di dalam kota. Pemerintah di pengungsian menyatakan bahwa mereka dapat mengerti keinginan penduduk untuk kembali ke Kota Bandung dan tidak akan menghalangi. Namun pemerintah meminta penduduk bersabar karena keadaan Kota Bandung sudah berbeda, saat itu Kota Bandung masih di bawah kekuasaan Belanda (Ekadjati, 1981, hlm. 303).

Hasil perundingan memberikan keleluasaan kepada pemerintah RI di pengungsian untuk kembali ke Bandung. Pada 21 Juli 1947 Belanda malah melakukan Aksi Militer I (Sundhaussen, 1986, hlm. 61). Gerakan militer ini ditunjukkan ke daerah selatan Bandung, lalu ke Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Kemudian Belanda mendudukinya. Akibat gerakan militer ini, penduduk kota-kota tersebut, termasuk pengungsi dari Bandung, menyingkir ke luar kota untuk menyelamatkan diri. Salah satu cara penyelamatan yang dilakukan adalah kembali ke Bandung. Menurut pemikiran mereka, setelah kota Garut, Tasikmalaya, dan kota-kota lainnya jatuh ke tangan Belanda, maka kota-kota tersebut kondisinya sama saja dengan kota Bandung, yaitu sebagai daerah pendudukan Belanda (Ekadjati, 1981, hlm. 315).

Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I rakyat Jawa Barat yang dimotori pasukan Divisi Siliwangi membuat kantong-kantong pertahanan yang dikenal dengan *wehreise* di daerah pedalaman. Dari *wehreise* inilah kemudian dilakukan serangan balik kepada pasukan Belanda dengan taktik perang gerilya. Ketika pasukan Divisi Siliwangi bersama dengan rakyat Jawa Barat sedang menghadapi pasukan Belanda dengan perang gerilyanya itu, pasukan Divisi Siliwangi diperintahkan untuk melakukan hijrah ke Jawa Tengah. Perintah itu dikeluarkan sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Republik Indonesia, termasuk Divisi Siliwangi, meninggalkan daerah Republik Indonesia, yaitu di sekitar daerah Jawa Tengah. Hijrah itu dilakukan mulai tanggal 1 Februari 1948 sampai 22

Februari 1948 melalui jalan darat dan laut. Sekitar 29.000 prajurit siliwangi telah di hijrahkan ke Jawa Tengah (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 93-102).

Dengan dilaksanakannya perintah hijrah tersebut, di mata sebagian rakyat Jawa Barat diartikan bahwa pasukan Siliwangi meninggalkan rakyat Jawa Barat yang sedang menghadapi tentara Belanda. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar. Di tengah kekosongan “pelindungannya” itu, masuklah tentara gerakan Darul Islam dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII) yang berusaha menggantikan posisi pasukan Siliwangi. Ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat karena Belanda telah melanggar Perjanjian Renville, yang mana peristiwa ini dikenal dengan long march pasukan Siliwangi, mereka harus berhadapan dengan tentara gerakan Darul Islam tersebut yang tidak menghendaki pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 97). Sementara itu, istilah Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk ketentraman negara kita pada tanggal 15 Maret 1947 telah dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada waktu Belanda mengadakan Aksi militernya pemerintah Kabupaten Bandung berkedudukan di Santosa. Pangalengan sudah dapat direbut, kemudian tentara Belanda melanjutkan gerakannya ke arah selatan, dan ke arah Santosa. Mendengar gelagat yang tidak baik tersebut, pimpinan pemerintah Kabupaten Bandung menjadi terpisah-pisah dan alat perlengkapannya menjadi tercecer. Rombongan Bupati Bandung ketika meninggalkan Santosa menuju

Cikopo kena bombardir. Untunglah tidak terjadi korban manusia, hanya mobilnya saja rusak dan tidak dapat di pakai lagi (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005, hlm. 97).

Di Cikopo rombongan hanya tinggal dua malam. Begitu pula di Pasirgara tidak tinggal lama karena terpaksa harus pindah lagi ke Bungbulang, di daerah Garut. Di Sekitar Bungbulang sering terjadi pertempuran dan tentara Indonesia sering mengalami kekalahan, karena keadaannya yang begitu genting. Bupati Bandung berikut beberapa orang stafnya yang mengikuti perjalanan atasannya pindah lagi ke Batuiuh. Di Batuiuh pemerintah Kabupaten Bandung sudah tidak berjalan, para pegawai sudah tak berdaya lagi. Bupati Bandung beserta istrinya disembunyikan di Batuiuh. Tatkala berada di Bungbulang pemerintah Kabupaten Bandung sudah kehabisan uang. Untung saja segera mendapat bagian droping uang dari pemerintah pusat di Jogjakarta, beberapa uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Asal-mula mendapat uang itu ialah adanya kapal terbang milik orang Amerika yang mendarat secara darurat di Pamengpeuk. Waktu kapal terbang itu bisa lepas landas lagi, utusan dari tentara Indonesia ikut menumpang ke Jogjakarta, untuk meminta droping uang dari pemerintah pusat. Permintaan tersebut ternyata dikabulkan (Lubis, 2007, hlm. 31).

Bungbulang dicoba untuk dipertahankan oleh tentara Indonesia. Untuk itu, didatangkan bantuan pasukan dari Sumedang. Mereka yang akan mempertahankan Bungbulang banyak yang mengambil jalan lewat Batuiuh. Akan tetapi, pada waktu tentara Belanda mengadakan serangan ke

Bungbulang, tentara Indonesia tidak dapat mempertahankannya. Akhirnya Bungbulang dapat diduduki tentara Belanda, karena keamanan bertambah buruk Bupati Bandung pindah lagi ke Lebakseuti. Para pegawai tetap berada di Nangkaruka. Tempat kedudukan Bupati di Lebakseuti sangat dirahasiakan karena ternyata serangan tentara Belanda ke Bungbulang itu, disamping untuk menyerang daerah Garut dan Tasikmalaya, juga dengan maksud untuk menangkap Bupati Bandung. Oleh karena itu pula, Bupati disembunyikan oleh kokolot Lebakseuti, Maja namanya di sebuah danau di tengah sawah.

Wedana Banjaran Ahmad mencari dimana Bupati Bandung berada, ia tidak menemukannya. Rupanya tentara Belanda mendapat kabar siapa yang menyembunyikan Bupati Bandung. Akhirnya Maja ditangkap oleh tentara Belanda dan dipaksa untuk menunjukkan di mana persembunyian Bupati Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra. Akhirnya Bupati Bandung dengan aparatnya ditangkap semua dan ditawan di Jalan Malabar Bandung (Irwana, 2011, hlm. 22). Penangkapan R.T.E Soeriapoetra tersebut karena ada yang membocorkan tempat persembunyiannya, masih satu keluarga, sehingga tertangkap kalau misalkan tidak ada yang memberitahu keberadaannya mungkin tidak akan tertangkap (Sastranegara, wawancara, 27 Februari 2018).

Jika merujuk pada pernyataan di atas, dapat dianalisis bahwa dua tahun dalam pemerintahan Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra (1945-1947) dilalui dengan ketidakmenentuan arah pembangunan, bahkan yang terjadi justru perang revolusi fisik dengan berbagai

konflik yang menyertainya. Hal tersebut dipicu dengan kembalinya Sekutu yang di dalamnya terdapat pasukan Hindia Belanda. Kedatangan mereka ke tanah air secara diam-diam ingin menguasai kembali tanah air. Di masa kepemimpinan Raden Toemenggoeng Endoeng Soriapoetra, ia terpaksa mengungsi meninggalkan Kota Bandung.

Bupati Bandung dengan penangkapnya (seorang tentara Belanda bernama Mustafa, orang Ternate) dan dengan pemeriksanya (seorang kolonel tentara Belanda). Serdadu Mustafa bertanya dalam bahasa Indonesia: *“Begini pak, sekarang, bapak toh tidak bisa bergerak apa-apa, jangan bergerak lagi. Nanti jadi bupati lagi. Tunggu sampai nanti tiga bulan lagi akan berdiri Pasundan. Nah di situ bapak akan jadi bupati.”* Jawab Bupati Bandung *“Tuan begini saja, kalau saya mau di tangkap, boleh saja, tapi bagaimana istri dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Bagaimana sekarang.”* Yah itu akan saya bantu apa yang diperlukan bapak (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 1974, hlm. 217).

Dengan diikuti oleh dua orang ajudan dan tentara Belanda. Bupati Bandung dibawa ke Bungbulang. Malam harinya diperiksa oleh seorang kolonel tentara Belanda. Kata kolonel itu: *“sekarang mau apa kamu?”* Jawab Bupati Bandung: *“kalau sudah begini ya saya tidak bisa apa-apa, mau dibunuh, bunuhlah terserah tuan.”* Sang Kolonel: *“besok kamu mau dikirimkan ke Bandung.”* Esok harinya setelah terlebih dahulu memberitahukan dengan surat kepada istrinya. Bupati Bandung bersama tawanan-tawanan lainnya, diantaranya para pegawai dan dokter Kabupaten Bandung berangkat dengan jalan kaki menuju Pakejang. Di

Pakejang telah disediakan tiga buah truk untuk mengangkut mereka. Di Bandung Suriaputra dan semua pegawainya ditempatkan di Jalan Malabar.

Satu hari setelah berada di Bandung, Male Wiranatakusumah mengunjungi Bupati Bandung. Mereka membicarakan tentang jabatan Bupati Bandung. Enam hari kemudian Bupati Bandung dipanggil oleh Residen Recomba (orang Belanda). Residen itu menawarkan jabatan Bupati Bandung lagi, tetapi dalam lingkungan Negara Pasundan. Tawaran tersebut tidak diterima oleh Raden Toemenggoeng Endoeng Soeriapoetra, karena ia merasa sebenarnya ia menjadi bupati itu telah memimpin pertempuran, sedangkan yang dipimpin olehnya yaitu sekarang menjadi T.N.I. ia yang memberi mereka makan dan mengurus makanannya. Oleh karena itu lebih baik bukan Soeriapoetra yang dijadikan bupati lagi. Sudah saja Male Wiranatakusumah yang dijadikan bupati. Setelah kejadian itu ia dipindahkan dari jalan Malabar ke Jalan Windu. Tempat dimana ia ditahan itu di rumah, meskipun demikian ia selalu diancam oleh pihak Belanda (Sastranegara, wawancara, 27 Februari 2018).

SIMPULAN

Soeriapoetra merupakan Bupati Bandung yang bukan berasal dari keturunan menak Bandung. Hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses pengangkatannya sebagai bupati, karena ia adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam urusan pemerintahan sipil. Setelah menjabat sebagai Bupati Bandung tidak banyak kebijakan yang ia buat, dikarenakan periode ia menjabat sebagai bupati tidak lama hanya berlangsung dua tahun mulai dari tahun 1945-1947. Selain

itu juga faktor utamanya dikarenakan saat ia memerintah kondisi Indonesia juga pada saat itu baru merdeka dan pemerintahannya belum stabil ditambah lagi harus menghadapi berbagai serangan dari pihak Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ultimatum dan serangan yang diberikan oleh pihak Sekutu dan Belanda mengakibatkan pemerintahan daerah berjalan dalam proses pengungsian, meskipun begitu roda pemerintahan tetap berjalan. Hal itu bisa terjadi karena kerjasama, komunikasi, rasa persatuan yang terjalin antara pimpinan, rakyat dan juga para pejuang. Kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan pada saat itu hanya untuk kepentingan perang seperti memperbaiki jalan, membuat jalan dan memenuhi kebutuhan makan dan juga pakaian untuk rakyat dan para pejuang. Jadi wajar saja apabila kebijakan dan program kerja yang dijalankan hanya sedikit mengingat situasi di Bandung sedang dalam situasi perang.

Memasuki tahun 1947, R.T.E. Soeriapoetra berhasil ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Pada saat ia berada dalam tahanan ia ditawarkan jabatan sebagai bupati kembali di bawah lingkungan Negara Pasundan akan tetapi ia menolak tawaran tersebut ia memilih untuk ditahan ketimbang harus bekerjasama dengan pihak Belanda. Penolakannya tersebut tepat karena ia sudah memimpin revolusi meskipun ia tidak terlibat dalam perang fisik tetapi ia yang memberikan makan dan melengkapi kebutuhan para pejuang, jadi tidak mungkin ia berkhianat. Jika dianalisis bahwa pemimpin dahulu kebanyakan mereka memang tidak haus akan kekuasaan tetapi rela berkorban tanpa pamrih untuk Indonesia mencapai kemerdekaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A, dkk. (2000). *Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan*. Bandung: Pustaka Madani.
- Adeng. (1995). *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Bandung dan Sekitarnya Tahun 1945-1949*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Adeng & Thresnawaty, E. (2003). *Perjuangan Rakyat Bandung Selatan Mempertahankan Kedaulatan Republik Indonesia*. Bandung: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Amar, D. (1963). *Bandung Lautan Api*. Bandung: Dhiwantara.
- Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung. (2005). *Sejarah Kabupaten Bandung: Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung dalam Prespektif Sejarah*. Bandung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.
- Budi, P. (2009). *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Darmawan, W. (1996). *Perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Barat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*. (Skripsi). Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Gottschalk, L. (2008). Nugroho Notosusanto: *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Ekadjati, E.S, dkk. (1980). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Ekadjati, E.S, dkk. (1981). *Sumber Sejarah Kota Bandung: Periode Revolusi 1945-1946*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ekadjati, E.S, Hardjasaputra, S. & Marlina, I. (1985). *Sejarah Kota Bandung 1945-1979*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hatta, M. (1982). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas
- Hasan, M.Z. (1980). *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang